

**KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN BANJIR
DAN BENCANA GALODO DI SUMATERA BARAT
(STUDI PADA PENANGANAN PASCABENCANA)**

Miftahul Hasanah¹, Nabila Laila Rani², Rifha Tri Oktary³, Boni Saputra⁴
^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
miftahulhasanah0805@gmail.com nabilalailaraniiii@gmail.com
rifhatrictary@gmail.com bonisaputra@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study aims to assess the performance of the Padang City Government, through the Regional Disaster Management Agency (BPBD), in addressing flooding and Galodo disasters, particularly in the post-disaster phase. A qualitative descriptive approach was employed, relying on literature studies and interviews. The findings indicate that the BPBD plays a crucial role in aid distribution, rehabilitation, and economic and social recovery. While its performance is quite responsive, it still faces challenges related to resources, budget, and intersectoral collaboration. Disaster management remains largely reactive. Therefore, institutional capacity building and improved coordination are needed to achieve more preventative and sustainable management.

Keywords: BPBD, Flood, Galodo, Government Performance, Post-disaster.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Padang melalui badan BPBD dalam menghadapi masalah banjir dan bencana galodo, terutama pada fase setelah bencana terjadi. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan mengandalkan studi literatur serta wawancara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD memegang peranan penting dalam penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Kinerja yang ditunjukkan cukup responsif, tetapi masih menghadapi hambatan terkait sumber daya, anggaran, dan kerja sama antar sektor. Penanganan bencana masih lebih sering bersifat reaktif. Maka dari itu, dibutuhkan penguatan kapasitas institusi dan peningkatan koordinasi untuk mencapai penanganan yang lebih bersifat preventif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Banjir, BPBD, Galodo, Kinerja pemerintah, Pascabencana.

A. PENDAHULUAN

Bencana banjir dan bencana banjir bandang (galodo) adalah masalah yang sering muncul di Provinsi Sumatera Barat, dengan

dampak yang besar pada kehidupan masyarakat. Curah hujan yang sangat tinggi, topografi area yang berbukit, serta perubahan penggunaan lahan menjadi beberapa penyebab utama terjadinya bencana ini. Seperti yang

diungkap oleh Carter W. Nick (2008), bencana alam dapat mengakibatkan konsekuensi yang luas tidak hanya dalam hal kerusakan fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Di penghujung tahun 2025, bencana galodo kembali terjadi di sejumlah lokasi di Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur, pemukiman penduduk, dan mengganggu kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah harus mampu memberikan respons yang cepat dan tepat, khususnya dalam menangani fase pascabencana yang fokus untuk memulihkan keadaan masyarakat. Penanganan pascabencana harus meliputi tidak hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pemulihan keadaan sosial serta ekonomi penduduk yang terdampak. Ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas sektor publik seharusnya dievaluasi dari manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat krusial sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan serta

melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD Kota Padang telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk menangani situasi pascabencana, seperti distribusi bantuan logistik, pembersihan material akibat bencana, serta memperbaiki infrastruktur umum dan tempat tinggal masyarakat. Selain itu, BPBD juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, aparat keamanan, dan komunitas untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah-langkah ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh. Menurut pendapat Moeheriono (2012), keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sistem kerja yang diterapkan, serta dukungan infrastruktur yang ada.

Namun, dalam penerapannya, masih ada beragam tantangan yang dihadapi dalam penanganan pascabencana galodo. Kekurangan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga kerja, maupun peralatan, menjadi salah satu hambatan utama

dalam kegiatan pemulihan. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya efektif dan kebutuhan masyarakat yang beragam juga menjadi tantangan untuk memastikan respon yang tepat dan merata. Hal ini sejalan dengan pandangan Agus Dwiyanto (2006) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik dapat dinilai melalui aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kinerja Pemerintah Kota Padang, khususnya BPBD, dalam menangani dampak bencana galodo yang terjadi pada akhir tahun 2025. Analisis kinerja dilakukan dengan menilai beberapa aspek, yaitu efektivitas dalam meraih tujuan pemulihan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ada, akuntabilitas dalam laporan kepada publik, serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara rinci kinerja BPBD Kota Padang dalam

menangani situasi setelah bencana galodo, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu penanggulangan bencana, terutama pada fase pascabencana, sehingga dapat menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Padang dalam menangani situasi pascabencana galodo. Metode kualitatif dipilih dengan maksud untuk menggali secara rinci mekanisme penanganan pasca bencana termasuk cara kerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang ditempuh oleh pemerintah setempat. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplor kondisi objek secara alami, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Kegiatan penelitian ini berlangsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (BPBD Kota Padang) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan bencana di wilayah tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah tahap pascabencana, khususnya mengenai aktivitas pemulihan, seperti distribusi bantuan, rehabilitasi, dan koordinasi antarinstansi. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana kinerja BPBD dalam merespon kebutuhan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta didukung oleh observasi terbatas. Wawancara dilakukan terhadap pihak BPBD yang terlibat dalam penanganan pascabencana dengan merujuk pada indikator kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, dan koordinasi. Di samping itu, dokumentasi yang berupa laporan kegiatan dan data penanganan bencana dimanfaatkan untuk melengkapi informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif menerapkan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi sumber dan metode diterapkan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen yang ada. Metode ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang objektif mengenai kinerja BPBD dalam mengatasi pascabencana galodo di Kota Padang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eektivitas penanganan pascabencana galodo dalam mencapai tujuan pemulihan masyarakat terdampak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, efektivitas dalam menangani pascabencana galodo menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha mencapai tujuan utama pemulihan masyarakat melalui berbagai program

dan kegiatan yang diterapkan di lapangan. Usaha tersebut mencakup pembersihan sisa-sisa bencana, distribusi bantuan logistik kepada warga yang terkena dampak, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang hancur akibat bencana. Aktivitas ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah dalam mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Pendapat Agus Dwiyanto mengindikasikan bahwa efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana sebuah organisasi mampu mencapai target yang ditetapkan. Namun, berdasarkan wawancara, efektivitas tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih ada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan dalam proses pemulihan, terutama kawasan yang sulit diakses karena kondisi geografis. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemulihan telah dilakukan, hasil yang dicapai masih belum merata di semua area yang terdampak.

2. Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga, dan logistik) dalam penanganan pascabencana galodo

Dari sudut pandang efisiensi, pemanfaatan sumber daya dalam

menangani pascabencana galodo telah dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas dan tingkat kebutuhan mendesak masyarakat. BPBD Kota Padang berupaya mengatur anggaran, tenaga, serta logistik dengan seefisien mungkin agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga yang terdampak. Ini sejalan dengan konsep efisiensi yang diuraikan oleh Mahmudi (2015), yaitu bagaimana sebuah organisasi dapat menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, hasil dari wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan dana dan jumlah staf tetap menjadi tantangan utama dalam implementasi penanganan pascabencana. Di samping itu, distribusi logistik juga menghadapi masalah, terutama di wilayah dengan akses terbatas, yang menyebabkan waktu lebih lama untuk menjangkau masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi dalam penggunaan sumber daya masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek perencanaan distribusi dan pengelolaan sumber daya agar lebih merata dan tepat sasaran.

3. Responsivitas pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak pascabencana galodo

Dalam hal responsivitas, pemerintah terlihat cukup sigap dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pascabencana galodo. Ini dapat dilihat dari adanya kegiatan pencatatan langsung di lapangan dan distribusi bantuan yang dilakukan dengan cepat setelah bencana terjadi. Responsivitas ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik, sesuai dengan pernyataan Agus Dwiyanto (2006) yang menjelaskan bahwa responsivitas adalah kapasitas organisasi untuk mengenali dan memenuhi keperluan masyarakat. Namun, di lapangan, masih ada beberapa tantangan, seperti lambatnya distribusi bantuan di beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh masalah akses dan keterbatasan transportasi. Selain itu, dari segi kepatuhan terhadap prosedur, penanganan pascabencana sudah dijalankan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ada, mulai dari pengumpulan data hingga rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan kegiatan sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, meskipun dalam realisasinya masih ada permasalahan teknis yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.

4. Akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat terkait penanganan bencana

Sementara itu, dari segi akuntabilitas, pemerintah berusaha memberikan laporan kepada warga melalui pembuatan laporan kegiatan dan penyampaian informasi mengenai penanganan setelah bencana. Ini sejalan dengan ide akuntabilitas yang diajukan oleh Moeheriono (2012), yang menyoroti pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas organisasi publik. Namun, hasil dari wawancara mengindikasikan bahwa transparansi informasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mengakses detail tentang bantuan dan program pemulihan yang diinisiasi pemerintah.

5. Efektivitas koordinasi antarinstansi dalam penanganan pascabencana galodo

Dalam hal koordinasi, kolaborasi antara berbagai instansi dalam menangani bencana galodo dianggap cukup efektif karena melibatkan sejumlah pihak, termasuk lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Koordinasi ini sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Namun, masih ada masalah dalam sinkronisasi data dan pembagian tugas antarinstansi yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, performa pemerintah dalam menangani pascabencana galodo telah menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih membutuhkan perbaikan dalam bidang efisiensi, distribusi bantuan yang merata, transparansi, dan penguatan koordinasi agar penanganan bencana di masa mendatang dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa performa Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (BPBD Kota Padang) dalam menangani situasi pascabencana galodo umumnya sudah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari berbagai tindakan yang diambil dalam proses pemulihan, seperti distribusi bantuan, pembersihan debris bencana, serta renovasi fasilitas publik. Dari segi efektivitas, penanganan telah mencapai tujuan pemulihan, meskipun belum merata di semua area yang terdampak. Dalam hal efisiensi, pemanfaatan sumber daya telah dilakukan dengan memperhatikan prioritas, namun masih menghadapi kendala dari keterbatasan dana dan tenaga kerja. Selain itu, respons pemerintah terhadap kebutuhan warga dinilai cukup baik, dan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal akuntabilitas dan koordinasi antarinstansi. Keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih mudah memperoleh

informasi seputar penanganan bencana. Selain itu, kerjasama antarinstansi juga perlu diperkuat, terutama dalam sinkronisasi data dan pembagian tugas untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terus-menerus agar kinerja pemerintah dalam penanganan situasi pascabencana di masa yang akan datang bisa lebih efektif, efisien, dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2006). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aulia, C., Meiwanda, G. 2022. Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat. (2022). *Journal Of Research And Development On Public Policy (Jarvic)*, 1(3), 35–44.
- Baskoro, F. R., & Akbar, R. (2018). Mengevaluasi sistem pengukuran kinerja di instansi publik: Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 52–63.
- Fernandez, D., Rifelino, R., & Adri, J. (2024). Pemulihan lingkungan dan sosial pascabencana: Kontribusi Fakultas Teknik UNP di Nagari Batipuh Baruah. *Community Engagement & Emergence Journal*, 5(3), 522–530.
- Mahdi, M., Triana, L., Nugroho, A., & Fitrah, A. U. (2023). Peningkatan kapasitas tangguh bencana banjir pada masyarakat Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 105–115.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslim, M., Ardiyansyah, A., & Anjani, F. (2021). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa. *KSAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 2(2), 85–89.
- Nadia, A., Febrianti, I., Hasibuan, L., & Indriani, R. (2026). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir Sumatra Barat: *Studi literatur. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(10)
- Putra, S. A., Rusba, K., Ramdan, M., Fuadi, Y., & Ananta, E. (2024). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Balikpapan. *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 10(1).
- Saragi, P.Y. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
- Widuri, W., Sartima, T., & Bachtiar, R. (2024). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3),